

Tantangan Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan

Ajai Saputra¹, Inka Nusamuda Pratama^{*2}

¹² Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

*Corresponding Author Email: inka.nusamuda@ummat.ac.id

Abstract

Abstract: Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, kesehatan, ekonomi, kelembagaan, dan pembangunan wilayah. Kompleksitas tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan karena berbagai upaya pengentasan kemiskinan sering kali masih dilakukan secara sektoral dan parsial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan melalui pendekatan multidimensi yang menghubungkan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pembangunan wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Data penelitian diperoleh dari database Dimensions dan Scopus melalui artikel ilmiah yang dipublikasikan selama periode 2021–2026 berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara kerentanan sosial, keterbatasan akses kesehatan, ketimpangan pembangunan wilayah, rendahnya inklusi ekonomi, serta lemahnya kapasitas masyarakat. Selain itu, strategi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, pemerataan pembangunan, dan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengentasan kemiskinan melalui perspektif multidimensi.

Keywords: Poverty Eradication; Inclusive; Sustainable Social Development

Introduction

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam proses pembangunan. Perspektif multidimensi menempatkan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi yang memengaruhi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensi kehidupannya secara optimal (Pitasse Fragoso, 2025). Dalam konteks pembangunan modern, kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan sosial inklusif karena proses pembangunan tidak hanya ditujukan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada upaya memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang pembangunan. Pembangunan sosial inklusif menekankan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pengurangan eksklusi sosial sebagai dasar dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan (Soleh, 2022).

Selain itu, pembangunan sosial inklusif juga memiliki keterkaitan dengan berbagai dimensi lain seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan wilayah, dan tata kelola pembangunan. Pendidikan dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan memutus siklus kemiskinan antargenerasi, sedangkan kesehatan menjadi modal dasar bagi peningkatan produktivitas Masyarakat (Azzahra et al., 2024). Pada sisi lain, pembangunan wilayah yang tidak merata dapat memunculkan ketimpangan akses terhadap infrastruktur, pelayanan publik, dan peluang ekonomi sehingga memperkuat kesenjangan kesejahteraan antardaerah. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi berbagai dimensi pembangunan secara komprehensif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Siatan et al., 2024).

Hubungan antara kemiskinan dan pembangunan sosial inklusif menunjukkan karakter yang kompleks dan saling memengaruhi. Kemiskinan tidak hanya menghambat kemampuan individu dalam meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlemah kohesi sosial dalam masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi memiliki potensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, manfaat yang dihasilkan tidak selalu terdistribusi secara merata sehingga dapat memperlebar ketimpangan pendapatan. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan perlu mengedepankan prinsip pertumbuhan inklusif agar kelompok masyarakat yang terpinggirkan dapat memperoleh manfaat dari proses Pembangunan (Pertiwi, 2024). Selain itu, inklusi sosial melalui perlindungan sosial universal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan. Di sisi lain, kemiskinan juga memiliki hubungan erat dengan akses pendidikan karena kelompok masyarakat miskin cenderung mengalami keterbatasan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga memperbesar risiko terjadinya eksklusi sosial secara berkelanjutan (Dhanda, 2024).

Tantangan dalam pengentasan kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kesehatan yang bersifat multidimensional. Hambatan struktural seperti lemahnya tata kelola dan praktik korupsi dapat mengurangi efektivitas program pengentasan kemiskinan, terutama apabila program yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan tingginya beban penyakit kronis dapat memperburuk kondisi kemiskinan

karena meningkatkan beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Disparitas sosial-ekonomi, seperti kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta ketimpangan gender, semakin memperumit upaya pengurangan kemiskinan karena menciptakan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan (Ruja et al., 2024)

Selain faktor sosial dan kesehatan, tantangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah juga menjadi hambatan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kesenjangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap pasar, pelayanan publik, dan peluang ekonomi. Rendahnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi juga menyebabkan beberapa wilayah mengalami keterlambatan pembangunan yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan (Zakiyyah, 2023). Di samping itu, ketidakefisienan birokrasi dan lemahnya implementasi kebijakan dapat memperburuk kesenjangan pembangunan antardaerah. Ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan migrasi penduduk dari daerah tertinggal menuju pusat-pusat ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi secara lebih luas

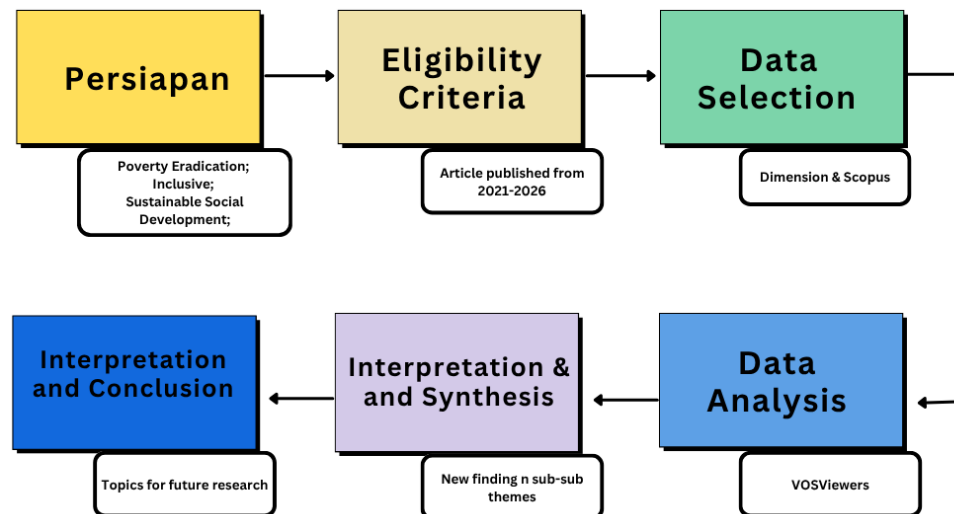
Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji kemiskinan dari berbagai perspektif seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, pembangunan wilayah, maupun inklusi sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih cenderung membahas faktor-faktor tersebut secara terpisah dan sektoral sehingga belum mampu menjelaskan keterkaitan antardimensi secara komprehensif dalam konteks pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pengaruh faktor individual atau ekonomi tanpa mengintegrasikan peran faktor sosial, kesehatan, tata kelola, dan ketimpangan pembangunan wilayah secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut untuk memahami tantangan pengentasan kemiskinan secara lebih holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan melalui pendekatan multidimensi yang menghubungkan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pembangunan wilayah.

Research Methods

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai Tantangan Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus (<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 5 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan Tantangan Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel

ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas Tantangan Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2021-2026); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



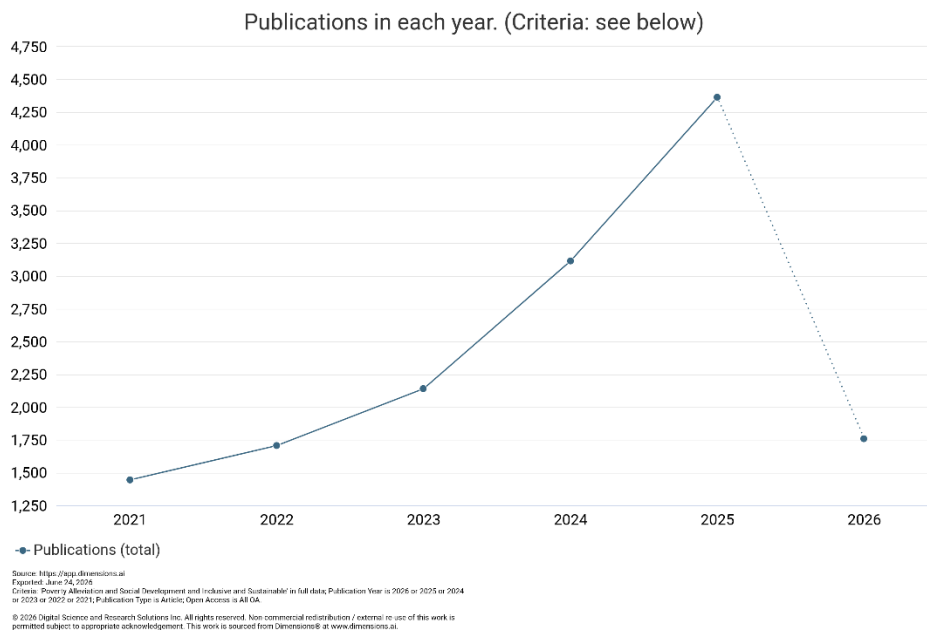
Gambar 1. Prosedur Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu Tantangan Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti “(Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial dan Inklusif dan Berkelanjutan) or (Poverty Eradication and Inclusive and Sustainable Social Development)”. Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2021-2026). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Tantangan Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Results and Discussion

1. Hasil Seleksi Data

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 115,871 data, meliputi data *open access* sebanyak 32,549 data dan sisanya adalah *close access*. Dari 32,549 data tersebut, terdapat 20.871 data merupakan artikel dan 11.678 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 14,531 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.



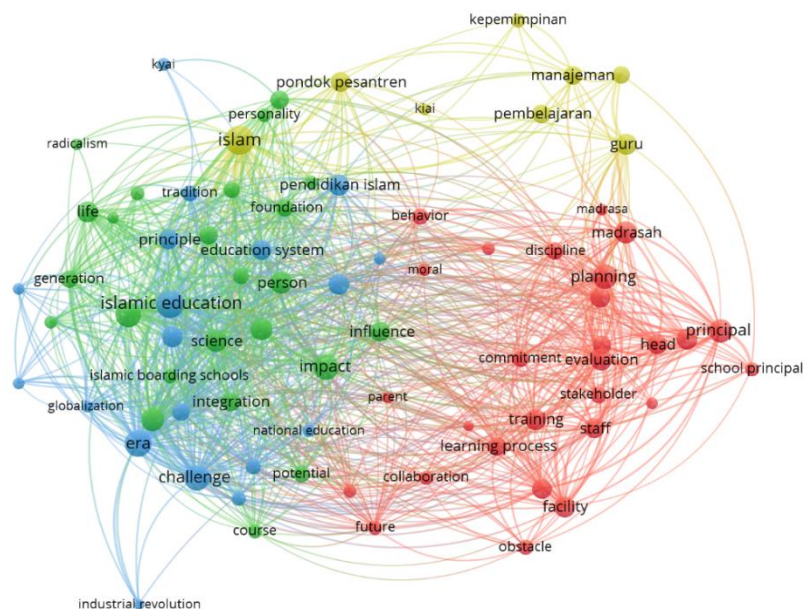
Gambar 2. Distribusi jumlah data selama 5 tahun terakhir

Berdasarkan grafik *Publications in each year*, terlihat bahwa tren publikasi penelitian mengenai *Tantangan Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan* menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2021–2025. Jumlah publikasi mengalami kenaikan secara bertahap dari sekitar 1.450 publikasi pada tahun 2021 menjadi sekitar 1.700 publikasi pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi sekitar 2.150 publikasi pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah publikasi mencapai sekitar 3.100 artikel, dan mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan jumlah sekitar 4.350 publikasi. Tren peningkatan ini mengindikasikan bahwa isu kemiskinan, pembangunan sosial inklusif, dan pembangunan berkelanjutan semakin mendapatkan perhatian dalam diskursus akademik global. Meningkatnya jumlah publikasi juga menunjukkan adanya perkembangan perspektif penelitian yang tidak lagi memandang kemiskinan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga menghubungkannya dengan dimensi kesehatan, sosial, lingkungan, pembangunan wilayah, serta agenda pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pada tahun 2026 terlihat jumlah publikasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 1.750 publikasi. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai penurunan minat penelitian atau menurunnya perhatian akademik terhadap topik ini. Penurunan jumlah publikasi

pada tahun 2026 lebih mungkin disebabkan oleh proses pengumpulan data yang dilakukan pada periode awal tahun sehingga banyak artikel masih berada pada tahap proses publikasi, *in press*, maupun belum terindeks secara keseluruhan pada basis data yang digunakan. Dengan demikian, jumlah publikasi tahun 2026 masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami peningkatan seiring bertambahnya publikasi yang terindeks hingga akhir tahun.

2. Visualisasi Jaringan Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Visualisasi jaringan dari variabel penelitian

Gambar 3 adalah visualisasi jaringan dari semua variabel yang diteliti selama 5 tahun terakhir dan menggambarkan empat kelompok warna berbeda: biru, hijau, merah. Interpretasi dari setiap variabel adalah sebagai berikut.

a. Klaster Biru (Dimensi Manusia, Kesehatan, dan Kerentanan Sosial dalam Kemiskinan)

Klaster biru terdiri atas kata kunci *person, health, disability, woman, child, family, determinant, empowerment, programme, prevalence, training, age, experience, dan initiative*. Secara konseptual, klaster ini menggambarkan pendekatan *human-centered poverty perspective*, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat analisis kemiskinan. Dalam klaster ini, kemiskinan dipahami bukan hanya sebagai kekurangan sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, dan kapasitas individu.

Keberadaan kata kunci *health* dan *person* sebagai node dominan menunjukkan bahwa isu kesehatan memiliki posisi sentral dalam menentukan kondisi kemiskinan. Individu yang mengalami keterbatasan kesehatan atau disabilitas cenderung menghadapi hambatan produktivitas, penurunan kapasitas kerja, dan keterbatasan akses terhadap sumber pendapatan. Kata kunci *woman, child, dan*

family mengindikasikan bahwa kelompok rumah tangga, perempuan, dan anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi fokus dalam penelitian kemiskinan.

Sementara itu, kemunculan *empowerment*, *training*, dan *programme* menunjukkan adanya orientasi penelitian pada pendekatan intervensi sosial melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan dipandang sebagai fenomena yang dapat dikurangi melalui pembangunan modal manusia (*human capital development*). Dari perspektif teoritis, klaster ini memiliki keterkaitan kuat dengan pendekatan *Capability Approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen, yang menekankan bahwa kemiskinan merupakan keterbatasan kemampuan individu dalam menjalankan fungsi hidup yang bernilai.

Interpretasi lebih lanjut menunjukkan bahwa penelitian masa depan berpotensi mengembangkan model hubungan antara kesehatan, pemberdayaan, dan kerentanan sosial terhadap pengurangan kemiskinan multidimensi.

b. Klaster Hijau (Keberlanjutan dan Pembangunan Sosial dalam Perspektif SDGs)

Klaster hijau terdiri dari kata kunci *community*, *sustainability*, *sustainable development goal*, *SDGs*, *management*, *practice*, *conservation*, *biodiversity*, *decision*, *initiative*, *trend*, *knowledge*, dan *climate*. Klaster ini menunjukkan transformasi paradigma kemiskinan dari pendekatan ekonomi menuju pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci *community* dan *sustainability* menjadi pusat dalam klaster ini, menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai aktor utama pembangunan. Kemunculan *SDGs* dan *Sustainable Development Goal* menegaskan bahwa penelitian kemiskinan saat ini banyak dikaitkan dengan agenda pembangunan global, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 1 (*No Poverty*), tetapi juga memiliki hubungan dengan tujuan lain seperti pendidikan, kesehatan, perubahan iklim, dan pengurangan ketimpangan.

Keberadaan kata kunci *climate*, *biodiversity*, dan *conservation* menunjukkan bahwa dimensi lingkungan mulai menjadi perhatian dalam studi kemiskinan modern. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga kerentanan ekologis. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam sangat rentan terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan menurunnya produktivitas sumber daya.

Secara teoritis, klaster ini memiliki keterkaitan dengan konsep *Sustainable Livelihood Framework* yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh aset manusia, sosial, finansial, fisik, dan sumber daya alam.

Interpretasi utama dari klaster ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan pada masa mendatang membutuhkan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat dan lingkungan sebagai sistem yang saling terhubung.

c. Klaster Merah (Mekanisme Ekonomi, Pendapatan, dan Model Pertumbuhan)

Klaster merah terdiri dari kata kunci *income*, *model*, *effect*, *mechanism*, *growth*, *efficiency*, *agriculture*, *financial inclusion*, *GDP*, *rural area*, *farmer*, *province*, *panel data*, *social capital*, dan *variable*.

Klaster ini menggambarkan perspektif ekonomi makro dan mikro dalam memahami kemiskinan. Kata kunci *income* memiliki ukuran node terbesar yang mengindikasikan bahwa pendapatan masih menjadi indikator dominan dalam penelitian kemiskinan. Hal tersebut

memperlihatkan bahwa sebagian besar penelitian masih menempatkan peningkatan pendapatan sebagai instrumen utama pengurangan kemiskinan.

Kehadiran kata kunci *growth*, *GDP*, dan *financial inclusion* menunjukkan hubungan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dalam klaster ini cenderung mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan melalui berbagai mekanisme seperti akses keuangan, produktivitas, dan efisiensi ekonomi.

Kata kunci *rural area*, *farmer*, dan *agriculture* menunjukkan bahwa wilayah pedesaan dan sektor pertanian masih menjadi fokus utama penelitian. Hal tersebut dapat dijelaskan karena tingkat kemiskinan di negara berkembang banyak terkonsentrasi pada rumah tangga petani dan masyarakat pedesaan.

Sementara itu, kemunculan *panel data*, *variable*, dan *heterogeneity analysis* menunjukkan dominasi pendekatan kuantitatif ekonometrik dalam penelitian. Penelitian tidak hanya berfokus pada hubungan langsung antarvariabel, tetapi juga mempertimbangkan variasi karakteristik wilayah. Interpretasi klaster ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu secara otomatis menurunkan kemiskinan. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh mekanisme distribusi, akses keuangan, modal sosial, dan karakteristik wilayah.

Berdasarkan pembagian klaster, para peneliti dapat melakukan studi yang lebih mendalam tentang beberapa topik sebagai berikut.

1. Kompleksitas Kemiskinan sebagai Fenomena Multidimensi dalam Pembangunan Sosial

Kemiskinan dalam perspektif pembangunan sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keterbatasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi sosial dan kesehatan yang membentuk tingkat kerentanan masyarakat. Kerentanan sosial muncul melalui berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendapatan, kerawanan pangan, kondisi tempat tinggal yang tidak memadai, serta ketimpangan sosial yang dialami kelompok masyarakat tertentu (Ashokan et al., 2024). Selain itu, perbedaan karakteristik demografis dan geografis juga memengaruhi tingkat kerentanan, terutama bagi kelompok marginal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan sumber daya sosial. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil cenderung menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai sehingga memperbesar risiko ketidaksetaraan kesejahteraan. Pada dimensi kesehatan, kondisi penyakit kronis, gangguan kesehatan mental, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan memperburuk kerentanan individu dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Situasi tersebut semakin kompleks apabila kebijakan publik belum mampu menjangkau kelompok rentan secara tepat sasaran sehingga kerentanan yang bersifat struktural dapat terus berulang dan berkembang menjadi kemiskinan yang lebih mendalam (Bonvin et al., 2023).

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kapasitas individu dan komunitas. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan akses ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penguatan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan, meningkatkan rasa percaya diri, memperluas partisipasi sosial, dan mengembangkan keterampilan yang mendukung peningkatan kesejahteraan (RAFA et al., 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa program berbasis masyarakat memiliki kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam

mengelola sumber daya lokal secara efektif. Selain itu, pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya terbukti lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dibandingkan pendekatan yang bersifat sektoral. Integrasi pengetahuan lokal ke dalam program pemberdayaan juga menjadi faktor penting karena dapat menghasilkan strategi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang pembangunan, sehingga keberhasilan program pemberdayaan memerlukan dukungan kelembagaan dan kebijakan yang lebih inklusif (Daffa et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang terbentuk melalui interaksi kompleks antara faktor sosial, kesehatan, ekonomi, kelembagaan, dan kapasitas masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dipicu oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap layanan dasar, rendahnya kualitas kesehatan, kerentanan sosial, dan lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya pembangunan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kompleksitas kemiskinan dalam pembangunan sosial muncul karena adanya hubungan timbal balik antara faktor struktural dan faktor individual. Keterbatasan kesehatan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, sedangkan lemahnya kapasitas sosial dapat membatasi peluang ekonomi yang tersedia. Pada sisi lain, pemberdayaan masyarakat mampu berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat kapabilitas individu dan komunitas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan pembangunan sosial yang bersifat inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan kesehatan, penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan akses sumber daya, serta pemberdayaan sosial yang mampu menjawab kerentanan masyarakat secara menyeluruh.

2. Dinamika Faktor Ekonomi dalam Tantangan Pengentasan Kemiskinan

Inklusi keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi karena berkontribusi terhadap perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk tabungan, kredit, investasi, dan layanan keuangan digital (RAFA et al., 2023). Peningkatan akses tersebut dapat memperkuat aktivitas ekonomi melalui peningkatan produktivitas, penciptaan peluang usaha, serta perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki hubungan positif dengan pembangunan ekonomi dan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan distribusi pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, pengaruh inklusi keuangan terhadap pengentasan kemiskinan tidak selalu bersifat langsung karena efektivitasnya dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Pada beberapa negara berkembang, kondisi struktural seperti rendahnya kapasitas ekonomi lokal, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya ketimpangan pendapatan dapat mengurangi efektivitas inklusi keuangan dalam menekan angka kemiskinan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada perluasan akses layanan keuangan, tetapi juga memerlukan dukungan kondisi ekonomi yang mampu menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata (Saha & Qin, 2023).

Ketimpangan regional merupakan salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi kerentanan ekonomi masyarakat pedesaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga merupakan hasil dari

faktor historis, geografis, serta struktur pembangunan yang tidak merata. Dominasi model ekonomi yang bersifat ekstraktif telah menciptakan ketergantungan masyarakat pedesaan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap perubahan pasar dan guncangan eksternal (Qu et al., 2023). Selain itu, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya investasi, dan minimnya akses terhadap pendidikan serta pelayanan kesehatan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pedesaan. Situasi ini menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran, rendahnya partisipasi tenaga kerja, serta menurunnya mobilitas sosial masyarakat. Ketimpangan pembangunan juga berdampak pada melemahnya kohesi sosial melalui meningkatnya konflik sosial dan migrasi internal yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang tidak merata berpotensi memperbesar kerentanan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan (Makwana & Elizabeth, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa dinamika faktor ekonomi dalam tantangan pengentasan kemiskinan tidak dapat dipahami secara sederhana melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi semata. Kemiskinan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara akses ekonomi, distribusi sumber daya, karakteristik wilayah, dan kapasitas pembangunan lokal. Inklusi keuangan memang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi manfaat tersebut dapat berkurang apabila dihadapkan pada tingginya ketimpangan pendapatan dan disparitas pembangunan wilayah. Di sisi lain, ketimpangan regional memperlihatkan bahwa masyarakat pedesaan masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pelayanan publik, dan minimnya peluang ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan ekonomi yang lebih komprehensif melalui integrasi kebijakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan akses keuangan, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang inklusif tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan struktural yang menjadi akar penyebab kemiskinan.

3. Strategi Pembangunan Sosial Inklusif dan Berkelanjutan dalam Pengentasan Kemiskinan

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dalam strategi pengurangan kemiskinan menjadi pendekatan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. SDGs menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai landasan utama yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pembangunan lainnya, seperti penghapusan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Hubungan antartujuan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan tidak dapat dilaksanakan melalui pendekatan sektoral yang terpisah, melainkan memerlukan strategi yang terintegrasi dan saling mendukung. Dalam konteks ini, pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian SDGs melalui peningkatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi hijau. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pertanian berkelanjutan yang memanfaatkan pendekatan ramah lingkungan serta penggunaan sumber daya secara efisien mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, meningkatnya tren penelitian global mengenai pengurangan kemiskinan memperlihatkan

pentingnya kolaborasi internasional dalam menghasilkan inovasi kebijakan dan pertukaran praktik terbaik untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan (Safruddin et al., 2024).

Pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat dan lingkungan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sosial. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan melalui penguatan kapasitas, kepemilikan sumber daya, dan pengambilan keputusan secara partisipatif. Keberhasilan pendekatan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan hak pengelolaan sumber daya yang jelas, kelembagaan lokal yang kuat, serta dukungan kebijakan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, integrasi antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekologis masyarakat setempat. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam menjaga keberlanjutan program berbasis komunitas, terutama terkait perubahan perilaku masyarakat, penguatan tata kelola lokal, serta kemampuan memperluas implementasi program pada skala yang lebih luas. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat memerlukan sinergi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (Sambodo et al., 2023)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa strategi pembangunan sosial inklusif dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan memerlukan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan secara simultan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya, kapasitas masyarakat, kualitas tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi SDGs menunjukkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan memiliki hubungan timbal balik dengan pencapaian tujuan pembangunan lainnya. Sementara itu, pendekatan berbasis masyarakat memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya bergantung pada intervensi pemerintah dari atas (*top-down approach*), tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Evaluasi terhadap berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan sosial yang inklusif perlu menggabungkan penguatan kelembagaan lokal, pemberdayaan masyarakat, pemerataan akses sumber daya, serta perlindungan lingkungan untuk menciptakan sistem pembangunan yang tidak hanya mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Conclusion

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang dibentuk oleh interaksi kompleks antara faktor sosial, kesehatan, ekonomi, kelembagaan, lingkungan, serta kapasitas masyarakat. Kemiskinan tidak lagi dapat dipahami hanya melalui indikator pendapatan, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, rendahnya kualitas kesehatan, ketimpangan pembangunan wilayah, keterbatasan akses ekonomi, serta lemahnya kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dimensi sosial dan kesehatan menunjukkan bahwa kelompok rentan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap penurunan kesejahteraan akibat keterbatasan layanan publik dan rendahnya kualitas hidup. Di sisi lain, dinamika faktor ekonomi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan memiliki kontribusi terhadap pengurangan

kemiskinan, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh distribusi sumber daya yang tidak merata dan ketimpangan regional yang masih tinggi.

Lebih lanjut, strategi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui sinergi antara pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta perlindungan lingkungan. Integrasi SDGs dalam strategi pengurangan kemiskinan menegaskan bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan lainnya sehingga memerlukan pendekatan lintas sektor yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan transformasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia, pemerataan pembangunan, peningkatan akses terhadap sumber daya, dan pembangunan sistem sosial yang mampu meningkatkan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan.

References

- Ashokan, A. M., Rajagopal, J., Krishnaswamy, P., Sheela, L. R., Marimuthu, P. D., & Pothumani, D. S. (2024). Social vulnerability assessment in the health and disease context. *Discover Social Science and Health*, 4(1), 55.
- Azzahra, A., Rahayu, R., Marlina, N. S., Saebah, N., & Saputro, W. E. (2024). The role of education in economic growth and breaking the chain of poverty in Indonesia. *Journal of Management, Economic, and Financial*, 2(2), 55–63.
- Bonvin, J.-M., Tabin, J.-P., Perriard, A., Rosenstein, E., & Lovey, M. (2023). Social policies, vulnerability and the life course: A complex nexus. In *Withstanding vulnerability throughout adult life: Dynamics of stressors, resources, and reserves* (pp. 123–138). Springer.
- Daffa, D. R., Arthuro, D., Fernanda, J. A., & Pratama, M. B. W. (2024). Gender Role Dynamics in Economic Development: Challenges and Opportunities for Women's Empowerment. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 4(2), 357–367.
- Dhanda, V. (2024). The Role of Education in Reducing Poverty and Social Inequality. *Journal of Research in Vocational Education*, 6(9), 27–30.
- Makwana, G., & Elizabeth, H. (2024). Social Inequality and Deagrarianization in Rural Change. *BSSS Journal of Social Work*, 16(1), 63–76.
- Pertiwi, H. M. (2024). The impact of economic growth and development on inequality and poverty. *Journal of Economic Growth and Development Review*, 12–17.
- Pitasse Fragoso, K. (2025). Poverty as capability deprivation: Considering the relational approach, group-based analysis, and socio-structural lens. *European Journal of Social Theory*, 28(2), 247–263.
- Qu, R., Lee, S.-H., Rhee, Z., & Bae, S. (2023). Analysis of inequality levels of industrial development in rural areas through inequality indices and spatial autocorrelation. *Sustainability*, 15(10), 8102.
- RAFA, F. R., ATI, K., SHAHIFA, K., & MOHAMMAD, R. P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan. *CONCEPT: JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND EDUCATION Учёные: Политехник Pratama Purwokerto*, 3(1), 167–173.
- Ruja, I. N., Sumarmi, & Idris. (2024). Programs, opportunities, and challenges in poverty reduction: A

- systematic review. *Sage Open*, 14(2), 21582440241256240.
- Safruddin, L. J., Judijanto, L., & Harsono, I. (2024). Bibliometric Analysis of the Effect of Sustainable Agricultural Practices on Farmers' Economic Sustainability. *METHODS*, 25, 27.
- Saha, S. K., & Qin, J. (2023). Financial inclusion and poverty alleviation: an empirical examination. *Economic Change and Restructuring*, 56(1), 409–440.
- Sambodo, M. T., Hidayat, S., Rahmayanti, A. Z., Handoyo, F. W., Yuliana, C. I., Hidayatina, A., Purwanto, P., Suryanto, J., Yaumidin, U. K., & Nadjib, M. (2023). Towards a New approach to community-based rural development: Lesson learned from Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2267741.
- Siatan, M. S., Gustiyana, S., & Nurfitriani, S. (2024). Infrastructure development and regional disparities. *KnE Social Sciences*, 9(16), 799–806.
- Soleh, A. (2022). Inclusive growth: A poverty approach. *Technium Business and Management*, 2(2), 1–15.
- Zakiyyah, N. A. A. (2023). Infrastructure and poverty: state budget effect analysis with panel model. *JAMPE (Journal of Asset Management and Public Economy)*, 2(2), 82–94.